



RENCANA KERJA (RENJA) Reviu TAHUN 2025

KECAMATAN BANJARNEGARA TAHUN 2024



KECAMATAN BANJARNEGARA

Jalan Raya Argasoka KM 02 No. 19 Telp (0286) 591015 Banjarnegara 53418

☐ <http://kecbna.banjarnegarakab.go.id> ✉ email : kec_banjarnegara@banjarnegarakab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2023 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 16.541.703.381 dengan fokus utama pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan tugas yang di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain.

4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
5. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).
6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing.
7. Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, terjadi perubahan yaitu Penambahan pagu anggaran program/kegiatan/sub kegiatan, - pada saat Perencanaan itu sampai ke pada DPPKAD terjadi perubahan yaitu berdasarkan KUA PPAS anggaran Kecamatan Banjarnegara menjadi 16.503.068.840. , perubahan Pagu Anggaran tersebut di berdasarkan Petunjuk dari Bapak Bupati terkait urusan wajib yang menjadi prioritas , yang akhirnya pada uraian wajib Kecamatan Banjarnegara mendapat Tambahan Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok OPD antara lain meliputi : Gaji, Air, Listrik , Telpon.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2023 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023, Pada Kegiatan Tahun 2025 mengikuti perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu Dasar Renstra Tahun 2023- samapai dengan 2026 , terdapa perubahan Indikator Utam yang mendukung menjadi tujuan camat Banjarnegara , yang semua ada 3 tujuan menjadi 2 tujuan adalah sebagai berikut :

Renstra Tahun 2017 – 2022 ada 3 tujuan

1. Nilai IKM Pada Tahun 2022 dari target 83, 5 tercapai 86,
2. Nilai SAKIP pada tahun 2022 mendapatkan nilai BB
3. Tersalurnya SPPT PBB dari target 100 %, tercapai 100 %

Renstra Tahun 2023- 2026

Ada 2 Indikator Sasaran Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. NILAI SAKIP Kecamatan
2. Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Faktor SDM yang mendukung
2. Faktor Anggaran yang memadai
3. Koordinasi Internal yang mendukung

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*jelaskan implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran dalam rangka memepertahan capaian kinerja yang sudah baik dan untuk mendukung kinerja para pemangku kegiatan agar lebih baik lagi, dengan memperhatikan beberapa faktor , diantaranya:

1. Koordinasi masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Anggaran yang mendukung kegiatan
4. Regulasi yang jelas sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tabel 2.1									
.d. tahun 2023* Kabup aten Banjar negara Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7 +9
	Urusan Perencanaan								(11)=10 /4

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM	83,4	84,30	83,4	86,13	83,4	83,4	
		Nilai SAKIP	BB (70,80)	CC	BB (70,45)	PROSES	BB (70,45)		
		Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak		87%					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselasaan dokumen perencanaan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %		
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan	75 asn	75 asn	75 asn	75 asn	75 asn	75 asn			
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan	12 laporan	12 laporan	12 orang -	12 laporan	12 laporan	35 orang			
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	12 laporan	14 dokumen -	14 laporan	14 laporan	14 dokumen			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket		
Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	3 Paket		
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi	3 UNIT	3 UNIT	3 UNIT	3 UNIT	3 UNIT	3 UNIT	3 UNIT	3 UNIT	3 UNIT	3 UNIT		

	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%			
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit			
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara	9 Unit	9 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit			

	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur							
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 UNIT	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha sesuai ketentuan	1.250 dokumen	9012 dokumen	1245 dokumen	1935	1.250 dokumen				
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan	Jumlah Pelaksanaa n urusan Pemerintah an yang terkait dengan Non Peizinan	3.950 dokumen	7418 dokumen	3.930 dokumen	3.982 dokumen	3.930 dokumen				
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaa n urusan Pemerintah an yang terkait dengan kewenanga n lain yang dilimpahka n	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 laporan				

	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah/ atau instansi yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah/ atau instansi yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						
	PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat						

	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 pokmas	10 pokmas	10 pokmas	10 pokmas	10 pokmas	10 pokmas	10 pokmas		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibangun	10 pokmas	10 pokmas	10 pokmas	10 pokmas	10 pokmas	10 pokmas	10 pokmas		
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Laporan yang dilaksanakan	9	9	9	9	9	9	9	kelurahan	

	Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	9	9	9	9	9	9	9				
	Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	9	9	9	9	9	9	9				
	Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen Penangan covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan	9	9	9	9	9	9	9				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan tugas forkompinc a di kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 desa		4 desa	4 desa	4 desa	4 desa				
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 desa									
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan desa	4 desa		4 desa	4 desa	4 desa	4 desa				
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	4 desa		4 desa	4 desa	4 desa	4 desa				

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pembinaan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	4 desa		4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban umum	Jumlah pembinaan transitibum	4 desa		4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah pembinaan penyusunan program PMD	4 desa		4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah koordinasi pendampingan desa	4 desa		4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu tiga. Indikator. Dari tiga indikator tersebut, satu berstatus tercapai dan dua indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan.
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Melakukan Koordinasi Internal di tingkat OPD
2. Evaluasi terhadap hasil kinerja
3. Optimalisasi Kinerja dan pendampingan terhadap agar tercapai target kinerja.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikutini:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian	Proyeksi					Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022		2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
	Nilai SAKIP Kecamatan		B	BB (70,80)	BB (71,00)	BB (71,25)	BB (71,50)	BB (70,45)	BB (70,80)	BB (71,00)	BB (71,25)	BB (71,50)				
	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan		83,2	83,3	83,4	83,5	83,6	86,13	83,3	83,4	83,5	83,6				

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2025 mencakup urusan tersebut. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2025 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Usaha , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum Optimalnya pemahaman dan kesadaran dalam meningkatkan Kualitan Pelayanan Publik (baru sesuai cascading)
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam rangka menunjang Tugas dan fungsi kecamatan sebagai unit kerja perekam data administrasi kependudukan yang secara langsung melayani masyarakat, dan tugas – tugas lain yang terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan.
4. Keterbatasan Kemampuan aparatur kelurahan dan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan terkait dengan implementasi DAU Tambahan Kelurahan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- 5 .Belum Optimalnya kesadaran aparatur pemerintah Desa dalam mengerjakan buku-buku Administrasi Desa (tidak sesuai Juknis).
6. Belum Optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di kelurahan dan desa masing-masing.

7. Belum Optimalnya kesadaran aparaturn pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik
2. Rendahnya Tata Kelola Administrasi
3. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal ,
2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang mendukung suatu kegiatan
3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga suatu kegiatan dapat di laksanakan.
4. Kebijakan – kebijakan yang bersifat mendesak yang mengakibatkan peralihan anggaran ,sehingga rencana kerja tidak dapat tercapai sesuai ketentuan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. dan Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2023 tanggal 12 juli 2023 tentang penetapan RKPD tahun 2024 Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025 meliputi:

1. Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan
2. Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan tugas yang di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Rencana Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
	Pagu total				16.576.467.463
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec Banjarnegara	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	85.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Banjarnegara	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 desa	85.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 desa	10.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Banjarnegara	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 desa	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Banjarnegara	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 desa	5.000.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Keterangan
Pagu total				16.576.467.463	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec Banjarnegara	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	85.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Banjarnegara	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 desa	85.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 desa	10.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Banjarnegara	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 desa		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Banjarnegara	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 desa	5.000.000	

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Banjarmasin	Jumlah Dokumen yang di falsitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 desa	10.000.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Banjarmasin	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 desa	10.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Banjarmasin	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 desa	20.000.000
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec Banjarmasin	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		20.000.000
Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Banjarmasin	Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 desa	20.000.000

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Banjarmasin	Jumlah Dokumen yang di falsitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 desa	10.000.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Banjarmasin	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 desa	10.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Banjarmasin	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 desa	20.000.000
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec Banjarmasin	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		20.000.000
Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec Banjarmasin	Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 desa	20.000.000

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	
	Pemberdayaan Kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	100%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	10 pokmas	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	5 unit	3.105.615.200
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	10 pokmas	1.899.711.210
	Evaluasi Kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Jumlah laporan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan	9 kelurahan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	<i>Kec Banjaranegara</i>	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	100%	
	Pemberdayaan Kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Persentase Pemberdayaan Kelurahan	100%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	10 pokmas	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	5 unit	3.105.615.200
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	10 pokmas	1.899.711.210
	Evaluasi Kelurahan	<i>Kec Banjaranegara</i>	Jumlah laporan Evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan	9 kelurahan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	<i>Kec Banjaranegara</i>	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100%	

	Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Kec Banjaranegara	Jumlah dokumen Penangan covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	9 kelurahan	
	Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Kec Banjaranegara	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	9 kelurahan	
	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Kec Banjaranegara	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Pembinaan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	9 kelurahan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Banjaranegara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Kec Banjaranegara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	100%	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Banjaranegara	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	13.500.000

	Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Kec Banjaranegara	Jumlah dokumen Penangan covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	9 kelurahan	
	Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Kec Banjaranegara	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	9 kelurahan	
	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	Kec Banjaranegara	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Pembinaan covid 19 di tingkat desa dan Kelurahan	9 kelurahan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Banjaranegara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Kec Banjaranegara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	100%	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Banjaranegara	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	13.500.000

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	
	Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Persentase Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang	9.002.006.763
	Pelaksanaan Penataan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	160.305.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 laporan	10.000.000

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		
Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Persentase Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang	9.002.006.763	
Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	160.305.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 laporan	10.000.000	

	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	2.420.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Kec Banjarnegara</i>	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Kec Banjarnegara</i>	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	559.718.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Kec Banjarnegara</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	86.718.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Kec Banjarnegara</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	473.000.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Kec Banjarnegara</i>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	813.192.000

	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	2.420.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Kec Banjarnegara</i>	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Kec Banjarnegara</i>	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	559.718.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Kec Banjarnegara</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	86.718.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Kec Banjarnegara</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	473.000.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Kec Banjarnegara</i>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	813.192.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Banjaranegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	733.392.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Banjaranegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	unit unit	79.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Kec Banjaranegara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100%	333.485.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Kec Banjaranegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	64.915.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Banjaranegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2 unit	196.749.590

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Banjaranegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	733.392.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Banjaranegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	unit unit	79.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Kec Banjaranegara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100%	333.485.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Kec Banjaranegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	64.915.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Banjaranegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2 unit	196.749.590

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	72.063.100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Banjarmasin	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	293.786.800	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Banjarmasin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	5 unit	293.786.800	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Banjarmasin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	2 unit		
Pengadaan Mebel	Kec Banjarmasin	Jumlah unit mebel yang disediakan	5 unit		
Pengadaan Aset tetap Lainnya	Kec Banjarmasin	Jumlah unit Aset tetap Lainnya yang disediakan	2 unit		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Banjarmasin	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit		

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	72.063.100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Banjarmasin	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	293.786.800	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Banjarmasin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	5 unit	293.786.800	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Banjarmasin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	2 unit		
Pengadaan Mebel	Kec Banjarmasin	Jumlah unit mebel yang disediakan	5 unit		
Pengadaan Aset tetap Lainnya	Kec Banjarmasin	Jumlah unit Aset tetap Lainnya yang disediakan	2 unit		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Banjarmasin	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit		

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	297.485.300
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	297.485.300
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	3970 dokumen	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	1255 dokumen	3.600.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	293.885.300
Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	100%	

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	297.485.300
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	297.485.300
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan	3970 dokumen	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	1255 dokumen	3.600.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	293.885.300
Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	<i>Kec. Banjarnegara</i>	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	100%	

	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Banjaranegara	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 laporan		
	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Banjaranegara	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 laporan		

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

USULAN LANGSUNG (MASYARAKAT/LEMBAGA) - PENYAMPAIAN USULAN MUSRENBANG KELURAHAN PARAKANCANGGAH
KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA
2 PRIORITAS

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	S
1	18/01/2024		Rehab/ pembangunan gedung pemerintah (Kecamatan/Kelurahan)	rangka atap sudah rapuh/tua sangat membahayakan, bangunan belum representatif seperti belum tersedia toilet/kamar mandi pelayanan yang pisah gender	Jl. S Parman No.16, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Parakancanggah	Kabupaten / Kota	
2	18/01/2024		(Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	perlu nya pengerasan jalan menuju makam sayur karena ketika musim hujan dengan kondisi jalan sekarang masih tanah akan sangat menyulitkan dan membahayakan	RT 003 RW 011	Banjarnegara	Parakancanggah	Kabupaten / Kota	
3	17-01-2024		Pembangunan talud dan drainase sepanjang jalan Kabupaten di wilayah Argasoka	tanah mudah longsor, air meluap ke jalan, jalan hampir ambles	Jalan Kabupaten di wilayah Argasoka	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	

4	17-01-2024	Pembangunan Pelebaran Jembatan di wilayah kelurahan Argasoka	jembatan terlalu sempit, sering kecelakaan, jalan menikung dan menanjak	RT 002 RW 007 Kelurahan Argasoka	Banjarnegara	Argasoka	Kabupaten / Kota	
5	22/01/2024	(Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa)	Perlunya Peningkatan jalan ke makam Kemesu RT 04 RW 02 ke Karang lewas RT 02 RW 03 karena kondisi jalan masih tanah dan jalan tersebut merupakan akses pe pertanian.	Sokanandi RT 04 RW02 s/d Karang lewas RT 02 RW 03	Banjarnegara	Sokanandi	Kabupaten / Kota	
6	19/01/2024	Gedung Serba Guna	Kapasitas gedung pertemuan yang ada sangat terbatas dan Kelurahan belum memiliki gedung yang bisa untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat (Pertemuan, Olahraga)	RT 03 RW 06	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	
7	19/01/2024	Jembatan	Membuka akses jalan ke arah wilayah Parakancanggah, untuk memperpendek akses jalan	RT 03 RW 03 Losari	Banjarnegara	Semarang	Kabupaten / Kota	
8	22/01/2024	Pembangunan Talud	Talud longsor dipermukiman dan dekat jalan utama kabupaten longsor bulan Pebruari tahun 2023	RT. 002 RW.006 Kel. Krandegan	Banjarnegara	Krandegan	Kabupaten	Mei

9	22/01/2024		Pengaspalan Jalan Lingkungan	Jalan sudah rusak sejak lama untuk peningkatan perekonomian masyarakat	RW.009 Kel. Krandegan	Banjarnegara	Krandegan	Kabupaten	Mei
10	19-01-2024	Achmad Bowo Lestiono, S.Sos	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Kondisi Pemenuhan air bersih diwilayah RT 04 RW 04 Kelurahan Kutabanjarnegara untuk warga susah mendapat air bersih terutama dimusim kemarau, untuk itu diupayakan pembangunan SAB yang bisa menampung air dari sumber mata air yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat.	RT 004 RW 004, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Kutabanjarnegara	Kabupaten / Kota	
11	19-01-2024	Achmad Bowo Lestiono, S.Sos	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Pemenuhan kebutuhan air bersih diwilayah Kelurahan Kutabanjarnegara RT 05 RW 08 sangat diperlukan karena warga kesulitan air bersih apabila dalam musim kemarau dan sering wilayah tersebut minta bantuan dropping air bersih dari PDAM	RT 005 RW 008, Kab. Banjarnegara	Banjarnegara	Kutabanjarnegara	Kabupaten / Kota	
12	22/01/2024		Pembangunan Talud	Talud longsor dipermukiman dan dekat jalan utama kabupaten longsor bulan Pebruari tahun 2023	RT. 002 RW.006 Kel. Krandegan	Banjarnegara	Krandegan	Kabupaten	Mei

13	22/01/2024		Pengaspalan Jalan Lingkungan	Jalan sudah rusak sejak lama untuk peningkatan perekonomian masyarakat	RW.009 Kel. Krandegan	Banjarnegara	Krandegan	Kabupaten	Me
14	20/01/2024			SAB	Disaat pengeringan irigasi banyak sumur - sumur yang kering sehingga menyebabkan kurangnya air bersih dan kalo irigasi kering otomatis sumber mata air juga ikut kering.		RT 02 RW 03 Kelurahan Semampir		Ban
15	20/01/2024			TALUD	Pada saat hujan airnya dari jalan masuk ke halaman rumah dan kebun sehingga menyebabkan longsor, maka perlu adanya talud.		RT 01 RW 04 Kelurahan Semampir		Ban
16	19/01/2024		Relokasi Puskesmas Banjarnegara I	Puskesmas berada pada tempat yang tidak representatif, gedung pada lingkungan perumahan masyarakat serta tidak memiliki tempat parkir untuk karyawan dan pengunjung puskesmas	Kelurahan Karangtengah	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten	

17	19/01/2024		Pembangunan Gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Tunas Harapan Kelurahan Karangtengah	Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Harapan Kelurahan Karangtengah masih menggunakan Aula Kelurahan Karangtengah dengan tempat yang kurang representatif. Jumlah siswa : 28	Rt 07 Rw 3 Kelurahan Karangtengah	Banjarnegara	Karangtengah	Kabupaten	
18	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	1. Sarpras Lingkungan Pemukiman	1. Sarana Air Bersih						
			2. Drainase dan Selokan						
			a. Perbaikan Drainase	02	02	37.750.000	APBD		
			b. Pembangunan Gorong-gorong	01	03	20.000.000	APBD		
			c. Pembangunan Drainase	02	06	25.000.000	APBD		
			3. Sarana Pengolahan Sampah						
			4. Sumur Resapan						
			5. SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah)						
			6. Alat Pemadam Kebakaran						
			7. Pompa kebakaran portabel;						
			8. Penerangan lingkungan pemukiman;						
			9. Pemugaran RTLH						
			10. Penghijauan/LH						
			11. Sarpras Lainnya (Pos Kambling, trotoar, pengamanan jurang)						

2. Sarpras Transportasi	1. Jalan pemukiman;							
	a. Perbaikan Jalan Beton	02	01	35.000.000	APBD			
	b. Perbaikan Jalan Beton	02	01	35.000.000	APBD			
	c. Pembangunan Jalan Aspal	01	02	35.000.000	APBD			
	d. Pembangunan Jalan Beton dan Talud Jalan	02	02	40.000.000	APBD			
	e. Pembangunan Jalan Beton	01	03	30.000.000	APBD			
	f. Pembangunan Jalan Beton	02	04	35.000.000	APBD			
	g. Pembangunan Jalan Beton	01	07	35.000.000	APBD			
	h. Perbaikan Jalan Aspal	02	07	30.000.000	APBD			
	2. Jalan poros Kelurahan;							
	3. Jembatan pemukiman;							
	4. Jembatan poros kelurahan;							
	5. Talud pemukiman;							
	a. Pembangunan Talud Pemukiman	01	03	40.000.000	APBD			
	b. Pembangunan Talud Penahan Longsor	01	04	50.000.000	APBD			
	6. Talud jalan poros kelurahan;							
	7. Sarpras penunjang jalan/jembatan;							
	8. Sarpras keselamatan jalan;							
	9. sarpras pendukung pertanian; dan/atau							

		a. Pembangunan Saluran Air Pertanian	02	03	30.000.000	APBD			
		10. sarpras transportasi lainnya.							
	3. Sarpras Kesehatan	1. MCK untuk umum/komunal							
		2. Posyandu dan Posbindu							
		a. Pengadaan Alat Cek Kesehatan Posbindu Kit	Posyandu		28.000.000	APBD			
		3. Alat bantu penyandang disabilitas							
		4. Jamban sehat rumah tangga							
		5. Akses Air Bersih							
		6. Akses Sanitasi							
		7. Instalasi pengolahan air limbah							
		8. Pos Kesehatan Kelurahan							
		a. Sarpras Pelayanan Kesehatan Ibu Balita di PKD	PKD		20.000.000	APBD			
		9. Kegiatan Lainnya (Pembuatan Tempat CTPS, Perlengkapan posbindu/posyandu)							
	4. Sarpras Pendidikan dan kebudayaan	1. Taman bacaan masyarakat							
		2. Bangunan PUD							
		3. Wahana permainan PAUD							
		4. Sarpras kepenunudaan/olahraga/kesenian							
		a. Revitalisasi Lapangan kel.Wangon	Kel.Wangon		35.000.000	APBD			
		5. Wahana pendidikan keagamaan							

			6. Sarpras pendidikan dan kebudayaan lainnya						
		a. Pembuatan Panggung	01	03	10.000.000	APBD			
19 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dikelurahkan	1. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;							
		b. keluarga berencana;							
		c. pelatihan kader kesehatan masyarakat;							
		d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;							
		e. pelayanan pos pelayanan terpadu balita, pos binaan terpadu dan pos pelayanan terpadu lansia;							
		f. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan;							
		g. kampanye dan promosi hidup sehat;							
		h. pelatihan dan penguatan penyangkang difabel;							
		i. intervensi gizi spesifik ibu hamil, menyusui dan balita;							
		- PMT Posyandu, Balita Stunting dan Gizi Buruk	Kel.Wangon		20.000.000	APBD			
		j. pendidikan gizi masyarakat;							
		- Praktek Pengolahan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (PB2SA)							

			f. pendidikan pengasuhan pada calon orang tua/orang tua; g. pendidikan anak usia dini universal; dan/atau h. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya							
		3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	a. pengadaan alat usaha dan penyelenggaraan pelatihan usaha; b. pengadaan/pelatihan <i>start up</i> digital pemasaran produk usaha; 1. Pelatihan Start Up Pemasaran Tempe 2. Pelatihan Start Up Usaha 3. Pelatihan Pemasaran Produk c. pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kelurahan; d. pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga; e. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.							
		4. Pengelolaan kegiatan	a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;							

		lembaga kemasyarakatan	b. pengelolaan dan penyelenggaraan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga						
			- Pertemuan rutin PKK	Kel.Wangon		5.000.000	APBD		
			c. pengelolaan dan penyelenggaraan pos pelayanan terpadu;						
			- Pertemuan rutin kader posyandu	Kel.Wangon		10.000.000	APBD		
			d. pengelolaan dan penyelenggaraan Karang Taruna;						
			e. pengelolaan dan penyelenggaraan Rukun Tetangga/Rukun Warga;						
			f. pengelolaan dan penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Kel.Wangon		38.400.000	APBD		
			g. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya						
		5. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;						

			b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban						
			c. penyelenggaraan koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;						
			d. pengadaaan perlengkapan perlindungan masyarakat kelurahan;						
			e. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya						
		6. Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa	a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;						
			b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;						
			c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;						
			d. edukasi manajemen proteksi kebakaran;						
			e. mitigasi bencana; dan/atau						

			f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.										
Jumlah Total							689.650.000						

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL SEMENTARA				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2025 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk kecamatan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 Kegiatan dan 12 sub kegiatan.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dengan 3 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

d. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 4 sub kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Evaluasi Kelurahan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan 8 sub kegiatan yaitu : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa , Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa , Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa , Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa , Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Banjarnegara pada kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan tujuan dan sasaran memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan, yang mendukung Tujuan Rencana Perangkat Berdasarkan Rencana tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Pelayanan Publik

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran tersebut Kecamatan Banjarnegara dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Daerah mendukung Visi dan Misi ke Misi Pemerintah Daerah, sedangkan Visi Pemerintahan Daerah adalah ***Banjarnegara Maaaju Berbasis Pertanian***. Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Dearah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Banjarnegara sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari Empat misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu :

Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good govermend) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Kemerdekaan berpendapat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia Pasal 28 dan Pasal 28 pasal 3 , memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean goverment*. Fokus peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, diharapkan pelayanan dan kinerja yang baik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun sasaran dalam misi ini meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public untuk urusan kewilayahan;

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan;

Kecamatan Banjarnegara menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjarnegara dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan

Berikut ini Usulan Kegiatan Tahun 2025 dan Prediksi Tahun 2026 Kecamatan dan Kelurahan Banjarnegara

Format rincian terlampir

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN KECAMATAN DAN KELURAHAN BANJARNEGARA
RENJA 2025

NO	LOKASI	RENCANA ANGGARAN 2025		PREDIKSI ANGGARAN 2026	
1	KECAMATAN BANJARNEGARA	Rp	10.072.593.303	Rp	10.094.006.763
2	KELURAHAN SEMAMPIR	Rp	722.916.350	Rp	835.300.000
3	KELURAHAN PARAKANCANGGAH	Rp	967.000.000	Rp	1.114.400.000
4	KELURAHAN WANGON	Rp	580.000.000	Rp	582.000.000
5	KELURAHAN ARGASOKA	Rp	1.087.920.000	Rp	1.433.840.000
6	KELURAHAN KUTABANJARNEGARA	Rp	553.673.030	Rp	658.718.900
7	KELURAHAN KARANGTENGAH	Rp	587.800.000	Rp	859.300.000
8	KELURAHAN SOKANANDI	Rp	1.002.520.000	Rp	1.117.520.000
9	KELURAHAN SEMARANG	Rp	455.832.990	Rp	466.687.500
10	KELURAHAN KRANDEGAN	Rp	546.211.790	Rp	876.825.000
TOTAL ANGGARAN		16.576.467.463		18.038.598.163	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di

Sebagai berikut

(mengacu pada bab 5 RKPD)

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- 4) Ketersediaan prana dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah;
- 5) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja(Renja) Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah Kabupaten Banjarnegara serta penyusunan perencanaan anggaran(*budgeting*);

- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 program yang terdiri 1program pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, 1 program Urusan Keuangan dan 4 program pada Urusan Kewilayahan;
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 10 kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan.,2 Kegiatan pada Program Pelayanan Publik, 1 Kegiatan Pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dan 1 Kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa. Dan 1 Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Umum.

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 secara total sebesar Rp.**16.576.467.463** yang semuanya bersumber dari dana APBD Kabupaten Banjarnegara.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 15 Januari 2024

Plt. CAMAT BANJARNEGARA,


PENI HARININGSIH, S,Kom)
Pembina
NIP. 19690302 199903 2 002